



Bahasa dan Kekuasaan dalam Indonesia Kontemporer: Sebuah Analisis dalam Perspektif Strukturalisme Pierre Bourdieu

Eka Putri Saptari Wulan
Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia
Email: eka.putri@uhn.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-20 Revised: 2022-04-15 Published: 2022-05-21 Keywords: <i>Language;</i> <i>Power;</i> <i>Structuralism;</i> <i>Bourdieu.</i>	In the discourse of power and national politics, there are interesting things to be discussed critically. One of them is the emergence of new terms that are quite interesting. Terms such as <i>kadrun</i> , <i>cebong</i> , <i>kampret</i> , <i>chaplin</i> , and others. It is inevitable that the texts are associated with certain entities. This paper will look at the presence of these terms from the perspective of Pierre Bourdieu's structuralism. The results of the study found that these terms are associated with certain groups, these terms are social capital to build an imaginary structure that is affiliated with certain groups, and these terms spark polarization in the structure of society, especially regarding the struggle for top power in this country.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-20 Direvisi: 2022-04-15 Dipublikasi: 2022-05-21 Kata kunci: <i>Bahasa;</i> <i>Kekuasaan;</i> <i>Strukturalisme;</i> <i>Bourdieu.</i>	Dalam diskursus kekuasaan dan politik nasional, ada hal yang menarik untuk di diskusikan secara kritis. Salah satunya adalah munculnya term-term baru yang cukup menggelitik. Istilah-istilah seperti <i>kadrun</i> , <i>cebong</i> , <i>kampret</i> , <i>chaplin</i> , dan lain-lain. Hal itu tak pelak merupakan teks-teks yang diasosiasikan pada entitas tertentu. Tulisan ini akan melihat kehadiran istilah-istilah itu dalam sudut pandang strukturalisme Pierre Bourdieu. Hasil kajian mendapatkan bahwa istilah-istilah tersebut diasosiasikan pada kelompok tertentu, istilah-istilah itu merupakan modal sosial untuk membangun struktur imajiner yang berafiliasi pada kelompok tertentu, dan istilah tersebut mencetuskan polarisasi pada struktur masyarakat terutama berkenaan perebutan kekuasaan puncak di negeri ini.

I. PENDAHULUAN

Bahasa dalam konstruksi sosial menjadi elemen yang tidak bisa tidak ada, sebab dalam bangunan sosial selalu ada pesan yang dipertukarkan secara aktif, pertukaran pesan kemudian menjadi penanda aktifnya kegiatan adi kodrati manusia yang disebut sebagai komunikasi, pesan-pesan saling dipertukarkan yang pada awalnya di tujukan secara etis untuk mencapai mutual understanding diantara komponen masyarakat tersebut, dalam kenyataan kehidupan sosial politik di Indonesia, kehadiran istilah baru yang sengaja diciptakan merupakan keniscayaan yang tak mungkin dimungkiri. Konfigurasi politik menyeret aktor-aktornya untuk "mengelabui" bahasa, sehingga bukan sekadar berperan dalam pertukaran pesan normatif, realitasnya memang melampaui itu semua, dengan mencermikan sangat kuat kondisi-kondisi yang sifatnya kontra normatif, pada akhirnya memang kondisi kontra normatif itu saling bersahutan, karena dengan adanya eskalasi politik, polarisasi masyarakat sebagai pengguna bahasa telah terjadi.

Tak pelak kekuasaan yang diperebutkan dalam bingkai (yang diperesepsikan sebagai akti-

vititas politik yang demokratis) pesta demokrasi, menghadirkan masyarakat konstituen yang juga terbingkai, bahasa sebagai wahana transmisi pesan sungguh mempuyai posisi yang strategis, lalu orang-orang yang sudah dalam bingkai itu, tetap tidak kehilangan semangat berekspresi secara politik, dengan memunculkan terminologi yang digunakan dalam percakapan politik saat ini, pemilihan presiden dan wakil presiden di negeri ini adalah panggung yang telah melahirkan beberapa terminologi-terminologi baru, yang kemudian lebih digunakan untuk mengidentifikasi kelompok. Tulisan ini akan membahas bagaimana bahasa menjadi gayut mayut dengan kekuasaan lalu menimbulkan polarisasi sosial, bahkan hingga saat ini, perspektif Piere Bourdieu akan digunakan untuk membantu memberikan penjelasan mengenai realitas.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian reflektif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, kajian reflektif berupaya memroyeksikan permasalahan dengan bantuan perspektif teoretik terpilih untuk mendapatkan basis argumentasi dari suatu realitas, data diperoleh dengan menyerap sumber-

sumber skunder seperti jurnal, buku-buku, dan sumber lain yang relevan, data mentah itu kemudian diklasifikasikan dan dipilih bahan-bahan yang kompatibel dengan tema penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bahasa sebagai habitus

Dalam Indonesia masa lampau, ketika orde baru, legitimasi bahasa terjadi melalui kekuasaan sangat terlihat pada masa itu, pada saat berkuasa, Suharto mengucapkan akhiran (suffix) "kan" dengan ucapan "ken", cara pengucapan fonem ala presiden Suharto tersebut menjadi umum, populer, lalu akhirnya diterima menjadi kebiasaan atau habitus. Pada kenyataannya, kultur birokrasi di Indonesia di dominasi oleh budaya Jawa (Setiawan, 1998), selain itu ada klenik dan mistisisme Jawa juga diimani begitu rupa (Mulder, 2001), dominasi dan kekuatan kapital tertentu yang dalam diskursus ini adalah soal bahasa atau kapital budaya, bertahan karena derajat supremasinya tidak lagi dicermati atau diperhatikan dengan kritis (Madoc-Jones, et.al 2015). Selanjutnya perspektif Bourdieu tidak hanya menampilkan pemahaman namun juga memperlihatkan atau menunjukkan tanda dan atau simbol materi/kekayaan yang harus dihargai, juga sebagai tanda otoritas yang wajib dijunjung tinggi-tinggi, nilai ucapan dalam konteks dan logika pasar dicirikan melalui hukum formasi harga: "semakin banyak kapital yang dimiliki seseorang saat berbicara, mereka dapat lebih memanfaatkan perbedaan serta mendapatkan keuntungan dari perbedaan kapital" (lihat Bourdieu, 1991), di era sekarang mereka yang memiliki kekuasaan dan uang lebih berpeluang didengar karena kepemilikan kapital ekonominya tersebut.

2. Bahasa: Anak Tangga Kuasa

Bahasa pada dasarnya merupakan bentuk instrumen kekuasaan yang sifatnya simbolik-simbolik, proses aktif pertukaran bahasa nyatanya selalu berhubungan kuat dengan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991), untuk menjadi pihak pada posisi yang mendominasi, maka seseorang sebaiknya harus memahami medan yang ada dan memposisikan modal sesuai dengan medan atau arena, dalam diskursus politik, kapital yang amat sangat berperan adalah kapital pada dimensi sosial dan ekonomi. Tak pelak bahasa merupakan sistem simbolik yang sifatnya terstruktur

yang merupakan fundamental bagi rekonstruksi untuk mengukur hubungan antara suara dan makna (Bourdieu, 1991).

Dalam gelanggang politik nasional, munculnya istilah istilah kadrun, kampret, cebong tentu tidak lepas dari struktur, ada entitas yang diwakili oleh kata-kata tersebut sebagai bentuk strukturisasi masyarakat dalam konstruksi politik, kata-kata itu kemudian menjadi modal politik bagi entitas yang diwakilinya, dengan kata lain kapital politik merupakan bentuk kapital simbolik, yang dalam konteks komunikasi politik nasional entitas yang diwakili saling berhadapan secara diametral, unsur penting dalam kapital politik adalah reputasi yang terdapat pada kepercayaan dan pengakuan masyarakat kepada politikus tersebut, dalam konteks politik nasional, masing-masing entitas yang diwakili oleh kata cebong dan kampret mempunyai sosok tokoh yang mereka banggakan dan hormati. Tokoh-tokoh ini mempunyai keunggulan masing-masing yang pada tataran pragmatis dihadapkan pada kekuasaan objektif, maka dengan penggunaan kuasa bahasa sebagai representasi sifat dan keunggulan masing-masing, sesungguhnya menampilkan derajat ambiguitas pada kekuasaan objektif, kekuasaan objektif ini yang dibuktikan dengan adanya simbol, tahta dan sebagainya merupakan produk kekuasaan subjektif, yaitu pengakuan. Kredibilitas terletak pada dan melalui representasi, kepercayaan dan kepatuhan (Bourdieu, 1991).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bahasa dibentuk oleh habitus yang berperan sebagai alat kekuasaan simbolik, bahasa adalah modal penting untuk meraih singgasana kekuasaan, dalam perspektif kapital Bourdieu, kapital bukan dalam hal materi, kekayaan atau uang, melainkan pemikiran dalam perspektif sosial-budaya, dan simbol. Bahasa dalam panggung politik nasional akhirnya dipahami sebagai peragaan pertarungan kelas-kelas yang muncul akibat segregasi yang niscaya dalam percakapan sosial perebutan kekuasaan tertinggi di negeri ini, dalam realitasnya, kapital memberikan akibat yang sama, yaitu memunculkan perbedaan atas dasar kepemilikan kapital, dengan demikian kajian mendapatkan bahwa istilah-istilah tersebut diasosiasikan pada kelompok tertentu, istilah-istilah itu merupa-

kan modal sosial untuk membangun struktur imajiner yang berafiliasi pada kelompok tertentu dan istilah tersebut mencetuskan polarisasi pada struktur masyarakat terutama berkenaan dengan perebutan puncak kekuasaan di negeri ini.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Bahasa dan Kekuasaan dalam Indonesia Kontemporer: Sebuah Analisis dalam Perspektif Strukturalisme Pierre Bourdieu.

DAFTAR RUJUKAN

- Bonikowski, B. (2015). The promise of Bourdieusian political sociology. *Theory and Society*, 44(4), 385–391. <https://doi.org/10.1007/s11186-015-9246-7>
- Bourdieu. (1984). *Distinction: A Social Critique of Judgment of Taste*. (R. Nice, Ed.). Cambridge- Massachusetts: Harvard University Press.
- Bourdieu, & Wacquant. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Fairclough, N. (1989a). *Language and Power*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Hall, S., Evans, J., & Nixon, S. (2013). *Representation*. California: SAGE Publication
- Hallet, T. (2007). Between Deference and Distinction: Interaction Ritual Through Symbolic Power in an Educational Institution. *Social Psychology Quarterly*, 70(2), 148–171.
- Haryatmoko. (2010). *Habitus dan Kapital Dalam Strategi Kekuasaan*. In Seminar Paska-Sarjana Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2010. Jakarta.
- Jenkins, R. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. (Nurhadi, Ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Littlejohn, W. S. (2002). *Theories of Human Communication* (7th ed.). Belmont-California: Wadsworth Group.
- Littlejohn, W. S., & Foss, K. A. (2005). *Theories of Human Communication* (8th ed.). Belmont- California: Wadsworth Group.
- Lodge, D., & Wood, N. (2008). *Modern Criticism and Theory: A Reader* (3rd ed.). London and New York: Routledge.
- Lubis, Y. A. (2015). *Filsafat Ilmu, Klasik Hingga Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marx, K. (1887). *Capital A Critique of Political Economy Volume I Book One: The Process of Production of Capital*. (F. Engels, Ed.). Moscow: Progress Publishers.
- McDonald, M. (2013). Foreign policy internationalism and political possibility. *International Politics*, 50(1), 97–117. <https://doi.org/10.1057/ip.2012.30>
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Poespowardjojo, S., & Seran, A. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (1st ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Poespowardjojo, S., & Seran, A. (2016). *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Setiawan, A. (1998). *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago & London: The University of Chicago.
- Wintle, J. (2002). *Makers of modern Culture*. London: Routledge & Kegan Paul.